



PRO PATRIA

Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik

<http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria>

P-ISSN: 2622-9862 E-ISSN: 2622-707X

Vol.7 No. 1 Februari 2024



Peran Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Kelurahan Kadumerak Tahun 2022

Ade Millatus Sa'adiyyah*, Nina Mulyasari
Universitas Banten Jaya
Serang, Indonesia

Article History:

Submitted: 09-09-2024

Revised: 03-10-2024

Accepted: 07-10-2024

Abstract

This article aims to describe the global insights of young citizens and the conceptual framework of global citizenship education in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature study method carried out through several stages ranging from collecting, analyzing, to interpreting data from various written sources, such as books, journal articles, research reports, and other documents. Global insight includes not only knowledge of international events, but also an in-depth understanding of how those events are interrelated and impact everyday life in different parts of the world. In this era, young people must be able to think critically and be adaptive to global changes, as well as have high social awareness to be able to contribute positively in a global society. Global awareness includes cultural awareness, interconnectivity, global identity, social responsibility and critical thinking skills. All these dimensions aim to equip youth with the necessary skills to participate in a global society and deal with international issues. In the Indonesian curriculum, global citizenship education needs to be integrated with relevant approaches through thematic learning, collaborative projects, and the use of technology, aligned with the standards set by UNESCO to encourage awareness and active participation in global issues. This approach includes a number of key elements designed to improve learners' understanding, skills and attitudes in an interconnected global context.

Keywords:

*Role of Social Services,
Community Empowerment,
Family Hope Program.*

*Corresponding Author:

Ade Millatus Sa'adiyyah

Universitas Banten Jaya

Email address: ade.millatus@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara berkembang masih dalam proses pembangunan khususnya di bidang ekonomi, memiliki masalah kemiskinan yang masih menjadi sorotan utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemiskinan bagaikan setumpuk gunung es yang harus segera di pecahkan. Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus di kaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab terhambatnya kesejahteraan suatu bangsa. Kesejahteraan pada umumnya keinginan bagi setiap manusia. Keluarga miskin di Indonesia masih cukup besar dengan sebaran angka kemiskinan penduduk desa dibanding penduduk kota. Ketiadaan lahan, dan jumlah anak yang banyak dalam satu keluarga menjadi beberapa faktor penyebab krusial kemiskinan di pedesaan. Kemiskinan telah membatasi hak

masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang memadai, mendapatkan pekerjaan yang memadai, mendapatkan kesehatan yang terjamin dan kemiskinan menjadi alasan rendahnya indeks pembangunan masyarakat di Indonesia. kemiskinan merupakan tema utama dari perjuangan negara, sebagai inspirasi dan perjuangan akan kemerdekaan bangsa, serta motivasi fundamental dari cita-cita untuk menciptakan 3 masyarakat yang sejahtera. Tingkat pendidikan dan kesehatan yang dipengaruhi oleh rendahnya kualitas hidup penduduk miskin ini dapat mempengaruhi produktivitas. Dengan kondisi seperti ini menyebabkan meningkatnya beban ketergantungan bagi masyarakat. Masyarakat yang mendominasi dibawah garis merupakan masyarakat yang rata-rata memperoleh penghasilan rendah.

kemiskinan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai di berbagai daerah di Indonesia. Perhatian khusus terhadap penanggulangan kemiskinan menjadi fokus dari program-program kerja seluruh daerah

di Indonesia. Kemiskinan membatasi proses Pembangunan banyak mengalami permasalahan dan hambatan dengan tumbuhnya penyakit sosial ekonomi di dalam Masyarakat (Arfiansyah, 2020). Berbagai program dan kebijakan dalam penanganan kemiskinan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat dari daerah masih belum menemukan cara tepat untuk mengatasinya, baik dalam kendala maupun sistem yang kurang tepat dalam objek penanganan. Sudah banyak program yang telah ada tetapi belum menyentuh akar dari permasalahan ini. Karena dilihat dari pemberdayaan kaum miskin untuk mengaktifkan sistem sumber yang tersedia. Program yang selama ini lebih berorientasi kepada kebijakan penanggulangan kemiskinan yang belum tepat sasaran, terbukti ketika ada program pemberdayaan yang dilakukan dari nasional maupun pemberdayaan yang dibuat dalam tingkat daerah maupun dari pusat (Haris, 2019: 2). Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 yaitu sebesar 26,16 juta

orang, yaitu menurun 0,34 juta orang dibanding September 2021 dan menurun 1,38 juta orang dibanding Maret 2021 (BPS, 2021).

Pemerintah Indonesia melalui kementerian sosial mengeluarkan program khusus yang yaitu program keluarga harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan persyaratan tertentu (Kementerian Sosial, 2016). PKH berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Pelaksanaan PKH dijalankan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 101/HUK/2022 *Tentang Pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) terkait sasaran penerimanya dan pendampingan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)*. Oleh sebab itu, dengan adanya PKH ini dapat

menjadi jalan dan usaha pemerintah dalam memberdayakan keluarga atau Masyarakat miskin. Dengan adanya pemberdayaan Masyarakat melalui PKH ini diharapkan sebagai langkah awal untuk memandirikan keluarga tersebut agar mampu bertahan dan memutus rantai kemiskinan. Bantuan PKH ini berupa pemberian langsung tunai berupa uang. Maksud dari pemberian langsung tunai ini bertujuan untuk membiayai sekolah anak, dan bagi ibu hamil untuk memeriksakan kandunganya secara berkala ke posyandu. Jika Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapat bantuan PKH tidak memeriksakan kandungannya ke posyandu secara berkala atau bagi anak usia sekolah ternyata tidak pergi kesekolah tanpa keterangan maka KSM mendapatkan potongan uang sebesar 10%. Masalahnya kemudian bahwa masyarakat menggunakan komplain terhadap pemotongan tersebut, mereka kira bahwa pemotongan tersebut dilakukan oleh para pendamping PKH atau Pemerintah Daerah, padahal pemotongan tersebut dilakukan secara otomatis

Berdasarkan sumber UPPKH Kabupaten Pandeglang, tahun 2008 PKH di Kabupaten Pandeglang Pada tahapan awal dalam melaksanakan PKH ini dimulai dari lima Kecamatan diantaranya adalah Picung, Sindang Resmi, Cibaliung, Cigeulis dan Sumur. Namun sejalan dengan perkembangan pada tahun 2011 ada penambahan enam kecamatan yang masuk pada PKH diantaranya Karangtanjung, Koroncong, Cadasari, Cimanuk, Menes dan Panimbang. Pada tahun 2015 PKH sudah menyeluruh di 36 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang dengan jumlah penerima 34.716 KSM. Di Kecamatan Karangtanjung terdapat empat kelurahan yang mendapatkan PKH, yaitu Juhut, Kadumerak, Cigadung dan Pagadungan. Jumlah penerima PKH di Kecamatan Karangtanjung sebanyak 697 KSM, dari jumlah rumah tangga 1.451 kepala keluarga. hal ini disadari masih banyak keluarga miskin di wilayah Kelurahan Kadumerak.

Program keluarga harapan (PKH) digulirkan di Kabupaten Pandeglang untuk merespon permasalahan kemiskinan yang ada, seperti yang terdapat di Kelurahan Kadumerak dengan adanya program keluarga harapan ini, bermaksud memberikan peluang kepada rumah tangga yang kurang mampu di kabupaten Pandeglang untuk ikut berperan terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka. Terutama dalam peningkatan kualitas hidup nantinya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan yang selama ini menjerat rumah tangga sangat miskin. Dapat disadari bahwa PKH ini dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan dan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung kepada RTSM dengan persyaratan yang telah ditentukan, Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), Pemberdayaan Masyarakat melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama),

Pemberdayaan PKH melalui Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan bagi lansia.

Dalam pelaksanaan PKH, terdapat peran Dinas Sosial yang menjadi wadah penting dalam menyukseskan PKH. Dinas Sosial yang merupakan instansi pemerintah memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat. Peran Dinas Sosial tidak jauh beda dengan peran pekerjaan sosial lainnya, yaitu membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami. Peran Dinas Sosial harus benar-benar diperhatikan dalam melaksanakan sebuah program ini secara langsung akan dapat dilihat sejauh mana standar program yang dicapai untuk dapat memberdayakan masyarakat serta keluarga berlandaskan pada sebuah program yaitu PKH (Program Keluarga Harapan).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKH (Program Keluarga Harapan) Di Kelurahan Kadumerak Tahun 2022”.

METODE

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kadumerak. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Kelurahan, Aparatur Kelurahan Kasi Bidang Kesejahteraan Sosial, Pendamping PKH, Aparatur Dinas Sosial bagian penanganan Sosial Masyarakat, dan Warga/Masyarakat. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan yang ada pada objek yang akan di teliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan, mendeskripsikan dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan (Sugiyono : 2007). Metode

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Peneliti menggunakan kualitatif dikarenakan pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dilapangan berdasarkan data yang telah terkumpul yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh kebenaran dalam bentuk dukungan di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu

1. Observasi dilakukan di Kelurahan Kadumerak, Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, dan warga/masyarakat. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan judul penelitian, kemudian mengamati objek yang diteliti yaitu peserta penerima bantuan KPM PKH di kediaman rumah masing-masing.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong 2014:186).

Wawancara ini dilakukan pada Pendamping PKH Kelurahan Kadumerak, Aparatur kelurahan Kasi bidang Kesejahteraan Sosial, Aparatur Dinas Sosial bagian penanganan Sosial Masyarakat, dan Warga/Masyarakat dan masyarakat, untuk mengetahui seberapa besar Peran Dinas Sosial Khusus pada Bidang yang terkait pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan, kemudian seberapa besar respon dari masyarakat RTSM penerima manfaat PKH di Kelurahan Kadumerak Kab. Pandeglang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi diperlukan dalam penelitian agar dapat memberikan keterangan dengan jelas mengenai penelitian yang diteliti. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, mengolah dokumen, memotret atau mengambil foto dan video (Arikunto : 2006:274). Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil dokumen yang berhubungan dengan keterlibatan Pendamping PKH, Aparatur kelurahan Kasi bidang Kesejahteraan Sosial, Aparatur Dinas Sosial bagian penanganan Sosial Masyarakat warga/masyarakat dan data Program Keluarga Harapan (PKH).

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Peran Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKH di Kelurahan Kadumerak Tahun 2022

Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang merupakan Lembaga yang bertanggung jawab terhadap berjalannya Pelaksanaan PKH dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kadumerak. Peran Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dalam pemberdayaan masyarakat melalui PKH di Kelurahan Kadumerak dilakukan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan PKH yang sudah diatur berdasarkan aturan keputusan Permensos Nomor 101/HUK/2022 Tentang Pelaksanaan Program keluarga Harapan serta mekanisme pelaksanaan dijalankan berdasarkan aturan Menteri Sosial RI dan mengikuti acuan dasar dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 Tanggal 3 Mei Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Peran Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKH di Kelurahan

Kadumerak secara umum adalah melakukan tahapan perencanaan, validasi data calon KPM PKH, penetapan keluarga penerima manfaat dan penyaluran bantuan peserta KPM PKH. Setelah melakukan perencanaan usulan proposal daerah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, langkah selanjutnya adalah melakukan pertemuan awal calon peserta KPM PKH untuk melakukan validasi dan kecocokan data.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PKH tahun 2022, dapat di ketahui alur pelaksanaan PKH, terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

- a. Perencanaan usulan proposal yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang
- b. Penetapan KPM PKH ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- c. Pertemuan awal dan validasi
- d. Penyaluran bantuan sosial
- e. Pemutahiran data
- f. Verifikasi komitmen

g. Graduasi peserta KPM PKH

Pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk menyampaikan dan atau kebutuhannya, pilihannya, ikut berpartisipasi, berorganisasi, dan mengelola kelembagaan masyarakat demi perbaikan kehidupannya (Mardikanto, 2017).

Pemberdayaan bukan hanya terpaku pada terpenuhinya kebutuhan pokok saja seperti sandang, pangan, dan papan. Tetapi juga diharapkan masyarakat mampu untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan membuka usaha kecil-kecilan, serta memiliki kepercayaan diri dalam berkembang menjadi masyarakat mandiri.

Masyarakat yang diberdayakan melalui PKH dan terdaftar sebagai anggota KPM PKH harus memenuhi persyaratan komponen penerima bantuan. Persyaratan komponen penerima bantuan PKH di Kelurahan Kadumerak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.11
Kategori Komponen Kesehatan

Jenis Kategori Penerima	Persyaratan
Ibu hamil	Ibu hamil harus memeriksakan kehamilan di faskes sebanyak minimal 4 kali selama kehamilan, dan melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan
Ibu nifas	Pemeriksaan kesehatan ibu nifas 4 kali selama 42 hari setelah melahirkan
Bayi 0-11 bulan	<ul style="list-style-type: none"> · Pemeriksaan kesehatan 3 kali dalam 1 bulan pertama · ASI eksklusif selama 6 bulan pertama · Imunisasi lengkap · Pembangan berat badn dan pengukuran tinggi badan setiap bulannya · Mendapat suplemen vit A satu kali pada usia 6-11 bulan · Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun
Anak usia 1-5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> · Imunisasi tambahan · Penimbangan berat badan minimal 2 kali dalam setahun · Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun

	Pemberian kapsul vit A 2 kali dalam setahun
Usia 5-6 tahun	Penimbangan berat badan 2 kali dalam setahun Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun

Sumber : hasil wawancara Kasi kesejahteraan sosial

Tabel 4.12
Kategori Komponen Pendidikan

Jenis Kategori Penerima	Persyaratan
Usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar SD,SMP,SMA	1. Terdaftar di sekolah/Pendidikan kesetaraan 2. Minimal 85% kehadiran di kelas

Sumber : hasil wawancara Kasi kesejahteraan sosial

Tabel 4.13
Kategori Komponen Kesejahteraan

Jenis Kategori Penerima	Persyaratan
Lansia	Memastikan pemeriksaan kesehatan Penggunaan layanan kesehatan Puskesmas santun lanjut usia Layanan home care (pengurus merawat, memandikan dan

	mengurus KPM lansia Mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal minimal 1 tahun sekali
Penyanggah disabilitas	Pihak keluarga melayani, merawat dan memastikan pemeriksaan kesehatan bagi penyanggah disabilitas berat minimal 1 tahun sekali ke Puskesmas

Sumber : hasil wawancara Kasi kesejahteraan sosial

Pada proses ini bantuan tunai hanya akan diberikan kepada KPM yang terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti syarat program (Pendidikan atau Kesehatan). Bukti kepesertaan sebagai anggota PKH adalah kepemilikan kartu PKH yang tercantum di kartu peserta PKH. Pendamping PKH memberikan kartu peserta kepada penerima KPM PKH sebelum pencairan pertama dilakukan.

Adapun besaran nominal yang dikeluarkan dari bantuan Program Keluarga Harapan pada tahun 2022 untuk KPM sebagai berikut :

Tabel 4.14

Besaran Bantuan Kesehatan dan Pendidikan

Indeks Bantuan	Besaran Bantuan Per RTSM	Besaran Bantuan Dalam 1 Tahun (4 Tahap)
Bantuan Komponen Kesehatan		
Ibu hamil	Rp. 750.000	Rp. 3.000.000
Anak usia dini	Rp. 750.000	Rp. 3.000.000
Bantuan Komponen Pendidikan		
SD	Rp. 225.000	Rp. 900.000
SMP/Tsanawiyah/ sederajat	Rp. 375.000	Rp. 1.500.000
SMA/Aliyah/Sederajat	Rp. 500.000	Rp. 2.000.000
Bantuan Komponen Kesejahteraan Sosial		
Disabilitas dan disabilitas	Rp. 600.000	Rp. 2.400.000

Sumber : hasil wawancara dengan pendamping PKH

Penerimaan bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga

yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun, anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar SD/SMP/SMA, lansia dan ibu hamil/nifas.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKH di Kelurahan Kadumerak

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang tahun 2022 mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui PKH di Kelurahan kadumerak.

a. Faktor penghambat

Dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Kadumerak, peneliti mendapatkan informasi terkait faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui PKH.

Faktor yang menghambat pelaksanaan PKH di Dinas Sosial Kabupaten pandeglang adalah pemutkahiran data yang berlangsung dalam

waktu yang lama, atau bahkan data administrasi yang mengalami eror karena hilang system atau karena tidak diperbaharui.

hambatan lainnya adalah terkait faktor internal yang meliputi ; 1) Kendala pendataan calon KPM PKH baru, peserta yang berpindah kartu keluarga di tetapkan menjadi KPM yang baru walaupun awalnya sudah pernah di data dan mendapat bantuan PKH. Lambatnya proses pendataan ini disebabkan oleh data DTKS yang sering mengalami kesalahan yang tidak terdektesi; 2) proses pemutakhiran data yang lama disebabkan karena adanya perbedaan data antara KTP dengan KK (Kartu keluarga) sehingga menghambat pencairan bantuan PKH. beberapa peserta penerima KPM PKH mengeluh karena terhambatnya masalah pencairan bantuan yang disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya karena ada perpindahan kartu keluarga, sehingga pihak pendamping PKH harus mendata ulang peserta PKH serta melakukan pembaharuan data agar nama

peserta PKH yang masih terdaftar sebagai komponen penerima bantuan dapat dimunculkan kembali.

Kemudian, hambatan eksternal yang terjadi pada pelaksanaan PKH di Kelurahan Kadumerak bahwa hambatan eksternal berasal dari masyarakat penerima bantuan KPM PKH. Rendahnya partisipasi dan tingkat pemahaman KPM terhadap Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kadumerak yaitu melakukan kegiatan yang dilakukan secara terencana menyeluruh dan melibatkan berbagai aspek yang harus dilakukan secara terpadu dan terlaksana dengan baik seperti, Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). Hal tersebut dilakukan untuk memberikan dorongan, pengetahuan pendidikan, Kesehatan, kesejahteraan, serta ilmu-ilmu yang dapat dipergunakan oleh peserta KPM PKH untuk bekal mengubah kehidupan

mereka menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya Faktor yang mendukung tercapainya pelaksanaan PKH di Kelurahan Kadumerak adalah hubungan komunikasi yang baik antara Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, pihak-pihak yang berperan dalam PKH di Kelurahan Kadumerak, pendamping PKH serta masyarakat penerima KPM PKH.

Upaya Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Dalam Pelaksanaan PKH di Kelurahan Kadumerak

Pemberdayaan masyarakat melalui PKH di Kelurahan Kadumerak merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut (Maryani D, 2019:8) Pemberdayaan masyarakat harus berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Perbaiki kelembagaan (*better institution*)
Dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan

mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan.

2. Perbaiki usaha (*better buissness*)
Perbaiki kelembagaan diharap akan memperbaiki bisnis yang dilakukan sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggota Lembaga tersebut dan masyarakat yang ada disekitarnya.
3. Perbaiki pendapatan (*better income*)
Perbaiki bisnis ini diharap dapat memperbaiki pendapatan seluruh anggota Lembaga, termasuk masyarakat.
4. Perbaiki lingkungan (*better environment*)
Perbaiki pendapatan diharap dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan kerap disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaiki kehidupan (*better living*)
Pendapatan dan lingkungan yang baik akan memperbaiki standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dilihat dari tingkat Kesehatan, Pendidikan dan daya beli.
6. Perbaiki masyarakat (*better community*)

Jika setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dalam mengatasi berbagai hambatan dalam pemberdayaan masyarakat melalui PKH di Kelurahan Kadumerak antara lain :

1. Dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dapat memberikan pengertian kepada masyarakat bahwasanya pendataan dilakukan oleh pihak pusat melalui koordinasi dengan BPS serta data yang diperoleh dari (Pendataan Program Perlindungan Sosial) PPPLS.
2. Para pendamping sosial di Kelurahan Kadumerak melakukan monitoring secara bertahap ke lapangan agar dapat melihat perkembangan dari peserta penerima bantuan dan memastikan para KPM melaksanakan kewajibannya sebagai peserta PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Apabila KSM sangat ingin menjadi anggota PKH mereka dapat membuat surat

pengaduan yang kemudian diserahkan kepada pendamping PKH. Kemudian pendamping PKH menyerahkan data waiting list tersebut kepada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang untuk selanjutnya dikirim ke UPPKH pusat sebagai sumber data (Pendataan Program Perlindungan Sosial) PPLS.

4. Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang terus melakukan koordinasi dengan pendamping PKH agar selalu melakukan pendekatan dan pengawalan setiap ada pengaduan dari KPM PKH sehingga mempercepat proses penyelesaian hambatan yang terjadi di lapangan. Agar program PKH ini dapat berjalan dengan lancar dan kesejahteraan masyarakat dapat merata dihimbau kepada masyarakat miskin untuk melaporkan kepada Kantor Kelurahan data kemiskinannya, sehingga mempermudah petugas dalam proses pendataan program penerima KPM PKH.

Berdasarkan keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor 8/3.4/kp.03/1/2023 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial,

bahwa Pendamping Sosial merupakan salah satu SDM Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun tugas dan fungsi pendamping PKH meliputi :

1. Menyusun rencana kerja PKH di wilayah dampungannya
2. Melakukan sosialisasi kebijakan dan bisnis proses PKH kepada aparat pemerintah tingkat Desa/Kelurahan, KPM PKH dan masyarakat umum secara berkala
3. Melakukan pemetaan dan fasilitasi kelompok KPM PKH berdasarkan kedekatan geografis dan potensi sumber daya
4. Melaksanakan proses bisnis PKH yang meliputi verifikasi validasi calon penerima bantuan sosial, penyaluran bantuan sosial, verifikasi komitmen, pertemuan bulanan P2PK, pemutakhiran data dan graduasi KPM
5. Melakukan edukasi penggunaan dan pemanfaatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Buku Tabungan kepada KPM PKH
6. Memastikan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dan Buku Tabungan diterima. Disimpan, dan ditransaksikan langsung oleh KPM PKH
7. Melakukan edukasi dan sosialisasi pencairan secara tunai
8. Melakukan fasilitasi KPM PKH untuk memperoleh bantuan program komplementer seperti Program Sembako, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar dan bantuan subsidi lainnya
9. Melakukan pendampingan, mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH dalam proses perubahan perilaku, pola pikir yang mandiri dan produktif
10. Melakukan fasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah dalam PKH di wilayah kerjanya
11. Menyusun dan menyerahkan laporan bulanan pelaksanaan PKH dan laporan lainnya secara berkala dan berjenjang
12. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktorat Jaminan Sosial

Adapun upaya yang harus dilakukan Pendamping PKH untuk meminimalisir terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui PKH ini adalah :

1. Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH setiap ada perubahan
2. Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan
3. Melakukan pendampingan KPM PKH untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban kehadiran pada pelayanan fasilitas Pendidikan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan
4. Melakukan kegiatan pertemuan di masyarakat RTSM (rumah tangga sangat miskin) agar melengkapi data-datanya untuk menjadi peserta PKH, sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh bantuan sesuai dengan kriteisa komponen PKH
5. Melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga setiap bulan untuk tujuan perubahan perilaku di

bidang Pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi seluruh KPM PKH

Untuk mengetahui keberhasilan PKH dalam memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kelurahan Kadumeak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.15

Indikator Keberhasilan

Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKH

No	Indikator Keberhasilan	Keterangan
1	Ketepatan sasaran penerima bantuan PKH	Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam verifikasi pendataan calon peserta PKH sudah dilakukan sesuai dengan data dari DTKS
2	Sosialisasi pemahaman pemberdayaan masyarakat melalui PKH	Pendamping PKH melakukan pendekatan serta sosialisasi

		mengenai tujuan dari PKH
3	Tujuan PKH	PKH bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan di Kelurahan Kadumerak diberikan kepada peserta yang memenuhi kriteria komponen PKH

Sumber : Data olahan peneliti

Maksud dan tujuan pemutakhiran data adalah untuk memperoleh proses perubahan terkini sebagian atau seluruh data anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Khusus PKH data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan. Pelaksanaan pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping setiap kali terjadi perubahan kondisi KPM yang ditemukan pada setiap kunjungan ke KPM PKH. Hasil pemutakhiran data akan dikirimkan kepada Dinas Sosial Kota/Kab

yang kemudian diteruskan kepada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.

SIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang dalam pemberdayaan masyarakat melalui PKH (Program Keluarga Harapan) dapat ditarik kesimpulan yaitu Pemberdaayaan masyarakat melalui PKH di Kelurahan Kadumerak dikatakan sebagai suatu program yang sudah berjalan lancar jika dilihat dari beberapa faktor pendukung seperti tercapainya pelaksanaan PKH di Kelurahan Kadumerak dengan adanya hubungan komunikasi yang baik antara Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, pihak-pihak yang berperan dalam PKH di Kelurahan Kadumerak, pendamping PKH serta masyarakat penerima KPM PKH. Melalui PKH masyarakat yang termasuk kedalam kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) bisa mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan anak dan

pelayanan kesejahteraan. Adapun Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui PKH, mengalami beberapa hambatan diantaranya pendataan kependudukan masyarakat miskin yang tidak lengkap sehingga menjadi kendala bagi Dinas Sosial dalam meratakan pemberian penerima bantuan PKH kemudian kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan (PKH).

Adapun beberapa faktor yang menghambat tercapainya pelaksanaan PKH di Kelurahan Kadumerak adalah pemutakhiran data yang berlangsung dalam waktu yang lama serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemahaman mengenai PKH

Upaya Dinas Sosial Dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui PKH adalah meningkatkan kualitas pelayanan pusat informasi mengenai pengaduan masyarakat penerima KPM PKH melalui pendamping PKH yang kemudian pengaduan tersebut akan

diteruskan kepada bagian Penyuluh Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya, Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang terus meningkatkan pertemuan dengan peserta penerima KPM PKH dengan cara melakukan pendekatan agar bantuan PKH dapat digunakan sebagaimana mestinya. Agar program PKH ini dapat berjalan dengan lancar dan kesejahteraan masyarakat dapat merata, dihimbau kepada masyarakat miskin untuk melaporkan kepada Kantor Kelurahan data kemiskinannya, sehingga mempermudah petugas dalam proses pendataan program penerima KPM PKH.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, S. L, (2012). *Bantuan Sosial Di Indonesia Sekarang dan Kedepan*. Jakarta: Fokus Media.
- Rustanto, B, (2015). *Menangani Kemiskinan*. Bandung: Remaja, Rosdakarya.
- Yusriadi, Dkk, (2020). *Pengentasan Kemiskinan Program Keluarga Harapan dan Sociopreneur*. Makassar: Budi Utama.
- Sudarwati, Ninik, (2009). *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*. Malang: Intimedia.

- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Haris, A. M. A. (2019). Pengenalan Masalah Fakir Miskin di Kelurahan Binong Kecamatan Batunggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 2(1).
- Lubis, S. A. (2019). *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sidangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Nurisma, N. (2021). *Analisis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Simpang Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu* (Doctoral Dissertation Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Alamin, A. R. (2010). *Analisis Peran Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara*.
- Fauziah, N., Sungkono, S., & Karnama, M. M. (2022). *Analisi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 9(8), 2753-2758.
- Margayaningsih, D. I. (2018). *Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. Publiciana*, 11(1), 72-88.
- Sulaiman, Endang Sutisna. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan: Teori dan Implementasi*. UGM PRESS
- Indonesia, R. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 101/HUK/2022/Tentang Pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH).